



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TAPIN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan **Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.**

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi Indikator target yang tertuang dalam RPD 2024 – 2026.

Kami menyadari bahwa pembuatan Perubahan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

Kami juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Rantau,    Juli 2024

Kepala  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tapin

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT  
NIP. 19710130 199903 1 005

DAFTAR ISI

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman judul                                                                               | i   |
| Kata pengantar                                                                              | ii  |
| Daftar isi                                                                                  | iii |
| Daftar Tabel                                                                                | iv  |
| <br>                                                                                        |     |
| BAB I : PENDAHULUAN                                                                         | 1   |
| 1.1. Latar Belakang                                                                         | 1   |
| 1.2. Maksud dan Tujuan                                                                      | 2   |
| 1.3. Dasar Hukum                                                                            | 3   |
| 1.4. Sistematika Penulisan                                                                  | 4   |
| BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023                                         | 5   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 | 5   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD                                                        | 16  |
| 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD                                  | 20  |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024                                               | 23  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat                                       | 41  |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           | 42  |
| 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional                                                     | 42  |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Tapin                                    | 43  |
| 3.3. Program dan Kegiatan                                                                   | 43  |
| 3.4. Review terhadap Perubahan RKPD 2024                                                    | 44  |
| BAB IV : PENUTUP                                                                            | 64  |

DAFTAR TABEL

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2023 | 7  |
| 2.2 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024        | 9  |
| 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                    | 16 |
| 2.4 Sumberdaya Dan Sarana/Prasarana Urusan Komunikasi Dan Informatika                | 20 |
| 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024                                   | 23 |
| 3.1 Program Kegiatan yang Mengalami Perubahan                                        | 45 |
| 3.2 Rincian Perubahan Anggaran Program Kegiatan TA 2024                              | 49 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Perubahan Renja SKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tertuang di naskah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun dengan disinkronisasikan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tapin Tahun 2024. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Urusan Kominfo TA 2024 ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Daerah Kabupaten Tapin dengan menggunakan dana APBD.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang undangan pada Pasal 27 PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, untuk menjabarkan apa yang akan dikerjakan dari apa yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2024. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun perencanaan strategis.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

### **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 adalah mewujudkan program dan kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama agar tercapai sasaran pembangunan Kabupaten Tapin.

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 seperti tersebut diatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026;
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

- 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024
- 16. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 000.7.2/272-Randal/Bappelitbang/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kominfo Kabupaten Tapin terdiri dari :

**Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Kominfo tahun 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Kominfo
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Tapin
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Review terhadap Perubahan RKPD 2024

**Bab IV. Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Review hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Setelah serangkaian pembahasan bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Tapin rencana Anggaran Tahun 2023 disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022 atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 8.305.404.354,- untuk membiayai 5 Program dan 11 kegiatan, 1 Program kegiatan pendukung, 4 Program kegiatan sasaran.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang bersumber dari APBD terdiri dari :

Belanja Langsung Pendukung ;

1. Program Aplikasi Informatika
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah.
  - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
    - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas;
    - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
    - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
    - Pengelolaan Media Komunikasi;
    - Pelayanan Informasi Publik;
    - Layanan Hubungan Media;
    - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Program dan Kegiatan 2023 Urusan Kominfo

1. Program Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
  - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
  - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
  - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Layanan Hubungan Media;
  - Pelayanan Informasi Publik;
  - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
  - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
  - Pengelolaan Media Komunikasi.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

2.1 Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2023

| No                               | Program/ Kegiatan                                                                                                                 | Anggaran      |                |               | Realisasi Fisik (%) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                   | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |                     |
| (1)                              | (2)                                                                                                                               | (3)           | (4)            | (5)           | (6)                 |
| Belanja Langsung Pendukung       |                                                                                                                                   |               |                |               |                     |
| 1                                | Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                | 6.212.969.709 | 5.590.076.261  | 89,97         | 100                 |
|                                  | a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | 22.840.680    | 22.840.680     | 99,93         | 100                 |
|                                  | b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah                                                                                         | 3.418.605.654 | 2.956.195.331  | 86,47         | 100                 |
|                                  | c. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | 1.419.738.703 | 1.418.234.637  | 99,89         | 100                 |
|                                  | d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                               | 795.969.434   | 736.722.470    | 92,56         | 100                 |
|                                  | e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 448.861.851   | 358.174.018    | 79,80         | 100                 |
|                                  | f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 106.953.207   | 97.924.805     | 91,56         | 100                 |
| Belanja Langsung Capaian Sasaran |                                                                                                                                   |               |                |               |                     |
| 2                                | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                           | 1.604.792.274 | 1.597.967.574  | 99,57         | 100                 |
|                                  | a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 1.604.792.274 | 1.597.967.574  | 99,57         | 100                 |
| 3                                | Program Aplikasi Informatika                                                                                                      | 4.680.496.153 | 3.313.037.392  | 70,78         | 100                 |
|                                  | a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.291.412.448 | 2.267.123.177  | 98,94         | 100                 |
|                                  | b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 2.389.083.705 | 1.045.914.215  | 43,78         | 100                 |
| 4                                | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                        | 140.510.192   | 137.777.432    | 98,06         | 100                 |
|                                  | b. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domnain di lingkup pemerintah daerah               | 140.510.196   | 137.777.432    | 98,06         | 100                 |

|                        |                                                                                                             |                |                |       |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 5                      | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi                                               | 154.037.414    | 141.202.717    | 91,67 | 100 |
|                        | c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 154.037.414    | 141.202.717    | 91,67 | 100 |
| Total Belanja Langsung |                                                                                                             | 12.792.805.746 | 10.780.061.376 | 84,27 | 100 |

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

| Kode | Urusan /Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program/<br>Kegiatan         | Indikator Kinerja<br>Program/<br>kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun<br>2024 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan<br>s/d tahun<br>(2023) | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Tahun 2024 |                                                              |                             | Target<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2024) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra<br>Perangkat Daerah<br>s/d tahun berjalan |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                   | Target<br>Renja<br>perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>(2024)                   | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>(2024) | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                                                       | Realisasi<br>Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan<br>s/d tahun<br>2024      | Tingkat<br>capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                 | 6                                                                           | 7                                                            | $8=(7/6)100$                | 9                                                                                                     | $10=(5+7+9)$                                                                               | $11=(10/4)100$                                              |
|      | PROGRAM APLIKASI<br>INFORMATIKA                                                  | Persentase<br>Perangkat Daerah<br>Yang Terhubung<br>Dengan Jaringan<br>Intra Yang Dikelola<br>Oleh Diskominfo | 35%                                                                                                                           | 13%                                                                                               | 35%                                                                         | 46%                                                          | 131,4%                      | 35%                                                                                                   | 46%                                                                                        | 131,4%                                                      |
|      |                                                                                  | Persentase<br>Pelayanan publik<br>yang<br>diselenggarakan<br>secara online dan<br>terintegrasi                | 87%                                                                                                                           | 80%                                                                                               | 87%                                                                         | 80%                                                          | 91,95%                      | 87%                                                                                                   | 80%                                                                                        | 91,95%                                                      |
|      |                                                                                  | Persentase desa /<br>kelurahan bebas low<br>spot (sinyal lemah)                                               | 64%                                                                                                                           | 63%                                                                                               | 64%                                                                         | 56%                                                          | 87,5%                       | 64%                                                                                                   | 56%                                                                                        | 87,5%                                                       |
|      | Pengelolaan Nama<br>Domain yang telah<br>Ditetapkan oleh<br>Pemerintah Pusat dan | Persentase desa /<br>kelurahan yang<br>terbangun sarana<br>telekomunikasi                                     | 60%                                                                                                                           | 53%                                                                                               | 60%                                                                         | 53%                                                          | 88,33%                      | 60%                                                                                                   | 53%                                                                                        | 88,33%                                                      |

|  |                                                                      |                                                                       |            |             |            |            |               |            |            |               |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|  | Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi                           | 87%        | 80%         | 87%        | 80%        | 91,95%        | 87%        | 80%        | 91,95%        |
|  |                                                                      | Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website           | 56%        | 38%         | 56%        | 42%        | 67,46%        | 56%        | 42%        | 67,46%        |
|  |                                                                      | Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website              | 100%       | 38%         | 100%       | 42%        | 42%           | 100%       | 42%        | 42%           |
|  | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps | 74%        | 70%         | 74%        | 78%        | 105,4%        | 74%        | 78%        | 105,4%        |
|  |                                                                      | Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat               | 56%        | 33%         | 56%        | 33%        | 58,92%        | 56%        | 33%        | 58,92%        |
|  |                                                                      | Persentase server sesuai standar                                      | 64%        | 48%         | 64%        | 80%        | 125%          | 64%        | 80%        | 125%          |
|  |                                                                      | Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi         | 74%        | 70%         | 74%        | 78%        | 105,4%        | 74%        | 78%        | 105,4%        |
|  |                                                                      | Persentase wifi publik yang sudah terbangun                           | 56%        | 33%         | 56%        | 33%        | 58,92%        | 56%        | 33%        | 58,92%        |
|  |                                                                      | Persentase server yang mampu mengelola database                       | 60%        | 50%         | 60%        | 83%        | 138,3%        | 60%        | 83%        | 138,3%        |
|  | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                       | <b>Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial</b> | <b>70%</b> | <b>-</b>    | <b>70%</b> | <b>53%</b> | <b>75,71%</b> | <b>70%</b> | <b>53%</b> | <b>75,71%</b> |
|  |                                                                      | <b>Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina</b>     | <b>75%</b> | <b>70%</b>  | <b>75%</b> | <b>50%</b> | <b>66,67%</b> | <b>75%</b> | <b>50%</b> | <b>66,67%</b> |
|  |                                                                      | <b>Persentase peningkatan jasa publikasi daerah</b>                   | <b>80%</b> | <b>100%</b> | <b>80%</b> | <b>53%</b> | <b>66,25%</b> | <b>80%</b> | <b>53%</b> | <b>66,25%</b> |

|  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |        |      |      |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
|  |                                                                              | Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan                                                                                                                                                | 90%  | 80%  | 90%  | 25%  | 27,78% | 90%  | 25%  | 27,78% |
|  |                                                                              | Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional          | 86%  | 100% | 86%  | 23%  | 26,74% | 86%  | 23%  | 26,74% |
|  |                                                                              | Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90%  | 100% | 90%  | 23%  | 25,56% | 90%  | 23%  | 25,56% |
|  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75%  | -    | 75%  | 50%  | 66,67% | 75%  | 50%  | 66,67% |
|  |                                                                              | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87%  | 100% | 87%  | 39%  | 44,83% | 87%  | 39%  | 44,83% |
|  |                                                                              | Persentase MoU yang diterbitkan                                                                                                                                                                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100%   |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                              |          |           |          |     |        |          |     |        |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----|--------|----------|-----|--------|
|  |                                            | Persentase PPID pelaksana aktif                                                                                                                                                              | 91%      | 79%       | 91%      | 70% | 76,92% | 91%      | 70% | 76,92% |
|  |                                            | Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                         | 76%      | 70%       | 76%      | 0%  | 0%     | 76%      | 0%  | 0%     |
|  |                                            | Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)       | 75%      | -         | 75%      | 43% | 57,33% | 75%      | 43% | 57,33% |
|  |                                            | Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90%      | 100%      | 90%      | 23% | 25,56% | 90%      | 23% | 25,56% |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks pembangunan Statistik (IPS)                                                                                                                                                           | 2,6 Poin | 2,27 Poin | 2,6 Poin | 0   | 0%     | 2,6 Poin | 0   | 0%     |
|  |                                            | Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi                                                                                                                                         | 90%      | -         | 90%      | 50% | 55,56% | 90%      | 50% | 55,56% |
|  |                                            | Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu                                                                                                                               | 90%      | 85%       | 90%      | 50% | 55,56% | 90%      | 50% | 55,56% |

|  |                                                                     |                                                                                                                         |            |      |            |            |        |            |            |        |
|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral                                                 | 90%        | -    | 90%        | 0%         | 0%     | 90%        | 0%         | 0%     |
|  |                                                                     | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral                                                             | 90%        | 85%  | 90%        | 0%         | 0%     | 90%        | 0%         | 0%     |
|  |                                                                     | Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik                                                     | 60%        | 40%  | 60%        | 40%        | 66,67% | 60%        | 40%        | 66,67% |
|  |                                                                     | Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral                                                               | 1 Aplikasi | -    | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100%   | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100%   |
|  |                                                                     | Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral                                                                         | 1 Dokumen  | -    | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0%     | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0%     |
|  |                                                                     | Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data                                                                      | 90%        | -    | 90%        | 90%        | 100%   | 90%        | 90%        | 100%   |
|  |                                                                     | Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi                       | 50%        | -    | 50%        | 0%         | 0%     | 50%        | 0%         | 0%     |
|  |                                                                     | Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah | 67%        | 56%  | 67%        | 0%         | 0%     | 67%        | 0%         | 0%     |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI       | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                                                        | 72%        | 70%  | 72%        | 0%         | 0%     | 72%        | 0%         | 0%     |
|  |                                                                     | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata                                                                         | 100%       | 100% | 100%       | 44%        | 44%    | 100%       | 44%        | 44%    |

|  |                                                                                        | kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI                                             |     |     |     |     |      |     |     |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|  |                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi        | 50% | 25% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% |
|  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sandiman yang tersertifikasi                                                       | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% |
|  |                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi              | 60% | 40% | 60% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100% |
|  |                                                                                        | Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan          | 60% | 25% | 60% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100% |
|  |                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan | 50% | 25% | 50% | 0%  | 0%   | 50% | 0%  | 0%   |
|  |                                                                                        | Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade                                | 56% | 44% | 56% | 0%  | 0%   | 56% | 0%  | 0%   |
|  |                                                                                        | Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi                                              | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% |
|  |                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik                          | 50% | 45% | 50% | 46% | 92%  | 50% | 46% | 92%  |

|  |                                                                                |                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                | Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |                                                                                | Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase titik PHKS yang teramankan                                                                     | 33%  | 11%  | 33%  | 33%  | 100% | 33%  | 33%  | 100% |
|  |                                                                                | Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun                                                    | 100% | 100% | 100% | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin  
Dinas Komunikasi dan Informatika

| No  | Indikator                                                                                                                                   | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |                         | Proyeksi              |                         | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                             |     | Tahun 2022<br>(thn n-2)         | Tahun 2023<br>(thn n-1) | Tahun 2024<br>(thn n) | Tahun 2025<br>(thn n+1) | Tahun 2022<br>(thn n-2) | Tahun 2023<br>(thn n-1) | Tahun 2024<br>(thn n) | Tahun 2025<br>(thn n+1) |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                                         | (4) | (5)                             | (6)                     | (7)                   | (8)                     | (9)                     | (10)                    | (1)                   | (12)                    | (13)             |
|     | IKU (Indikator Kinerja Utama) SK Kadis Kominfo No. 36a Tahun 2023                                                                           |     |                                 |                         |                       |                         |                         |                         |                       |                         |                  |
| 1   | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)                                                           |     | 58,3%                           | 65%                     | 75%                   | 85%                     | 58,3%                   | -                       | 75%                   | 85%                     |                  |
| 2   | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%) |     | 20,4%                           | 30%                     | 50%                   | 60%                     | 20,4%                   | -                       | 50%                   | 60%                     |                  |
| 3   | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%) |     | 100%                            | 100%                    | 100%                  | 100%                    | 100%                    | -                       | 100%                  | 100%                    |                  |
| 4   | Tingkat kemandirian informasi pemerintah (%)                                                                                                |     | 61,8%                           | 70%                     | 70%                   | 80%                     | 61,8%                   | -                       | 70%                   | 80%                     |                  |
|     | IKU (Indikator Kinerja Utama) SK Kadis Kominfo No. 47b Tahun 2023                                                                           |     |                                 |                         |                       |                         |                         |                         |                       |                         |                  |
|     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)                                                                                                         |     | 75,55                           | 76,00                   | 79,50                 | 80,00                   | 75,55                   | 79,05                   | 79,50                 | 80,00                   |                  |

|                               |                                                                                                                                                                        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                               | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)                                                                                                            |  | -     | 55,00 | 70,00 | 72,00 | 50,2  | 69,35 | 70,00 | 72,00 |  |
|                               | Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (Poin)                                                                                     |  | 2,29  | 3,00  | 3,50  | 3,60  | 2,29  | 3,09  | 3,50  | 3,60  |  |
| IKK (Indikator Kinerja Kunci) |                                                                                                                                                                        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|                               | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)                                                                                      |  | 58,3% | 65%   | 75%   | 85%   | 58,3% | 58,3% | 75%   | 85%   |  |
|                               | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)                            |  | 20,4% | 30%   | 50%   | 60%   | 20,4% | 20,4% | 50%   | 60%   |  |
|                               | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) |  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |  |
|                               | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)                                         |  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |  |
|                               | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)                                           |  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |  |
|                               | Tingkat kemandirian informasi pemerintah (%)                                                                                                                           |  | 61,8% | 70%   | 70%   | 80%   | 61,8% | 61,8% | 70%   | 80%   |  |

Dari tabel diatas, atas perubahan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kominfo dapat dilihat dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2023 terealisasi dengan baik yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 untuk Dinas Kominfo mencapai 79,05 poin dengan predikat BB, dari target Nilai tahun 2023 pada 76 poin dengan capaian 104%. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Evaluator APIP Inspektorat bahwa penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, menunjukan hasil yang “Sangat baik”.

2) Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2023 untuk Dinas Kominfo memperoleh Nilai 69,35 poin dari target 55 poin yang ditetapkan dengan capaian 126%. Indeks ini diperoleh melalui Aplikasi Padaringan Tapin berbasis android dan desktop untuk semua pegawai yang merupakan penerapan sistem merit terhadap penilaian kinerja dan profesionalitas pegawai melalui 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi jenjang Pendidikan, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pegawai, dan Disiplin Pegawai.

3) Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin

Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (SK terlampir), memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,09 dengan predikat Baik, hasil ini sudah berada diatas target di level 3 dengan rasio capaian 103%. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut.

Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin telah mempersiapkan infrastruktur SPBE dengan baik, terutama pada domain Kebijakan dengan Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi, Kebijakan Internal Layanan Pengadaan, K.I. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, demikian juga, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik, Kebijakan Internal tentang Keamanan Informasi, kebijakan audit

TIK, perlu ditingkatkan tata Kelola, penerapan manajemen resiko SPBE dan audit TIK. Kedepannya layanan-layanan berbasis elektronik dapat dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit kerja / OPD maupun integrasi dengan institusi lainnya.

Kemudian untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kominfo sampai dengan tahun 2023 terealisasi dengan baik yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ada 54 OPD termasuk Kecamatan dari 54 OPD yang ada di Kabupaten Tapin dengan persentase 100%. Dikarenakan semua OPD yang ada di Kabupaten Tapin sudah memiliki akses internet yang bersumber dari APBD dan DISKOMINFO sebagai penanggung jawab untuk menjamin kelancaran akses internet.
- 2) Layanan Publik yang dikelola Dinas Kominfo yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE ada 15 layanan dari 15 layanan public atau 100%, yaitu E-SAKIP Terintegrasi dengan SIMDA dan PADARINGAN, Web Profile Terintegrasi dengan TAPINKAB, TPP Online Terintegrasi dengan SIMPEG, TAPINKAB Terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA Terintegrasi dengan E-SAKIP dan SIMPEG, TIK Terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE Terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK Terintegrasi dengan SIMPEG, Govem Terintegrasi dengan TAPINKAB, JDiH Terintegrasi dengan TAPINKAB, Tapin Mesra Terintegrasi dengan TAPINKAB.
- 3) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah penduduk usia 17 tahun keatas sejumlah 150.051 orang (sumber: Disdukcapil Semester I 2023), dan dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 100% yang responsif terhadap informasi dan komunikasi publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu misalnya pada golongan usia tua hanya sebagian kecil saja yang melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan pada golongan usia muda minat dan kepedulian terhadap konten berita mengenai perkembangan daerah masih kurang. Disamping 2 hal tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan jaringan khususnya di wilayah dataran tinggi dan wilayah pesisir kabupaten.
- 4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ada 54 OPD Dinas, Badan, dan Kantor dari 54 OPD yang ada di Kabupaten Tapin dengan persentase 100%. Melalui buku profil daerah Kabupaten Dalam Angka (KDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Statistik Sektorial Kabupaten Tapin dan Statistik Ekonomi Makro.
- 5) Perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah berdasarkan Indeks KAMI pada 5 area Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi saat ini menunjukan pada indeks nilai 440 dari 645 dengan capaian 68,21%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023 – 2024 (berjalan) dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

- 1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- 2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Bidang kominfo maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Tapin;
- 3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;

**Tabel 2-4**  
**Sumber Daya Dan Sarana/Prasarana Urusan Komunikasi Dan Informatika**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2023**

| No | Urusan Kominfo / Program           | Sumber Daya / Sarana-Prasarana                                   | Jumlah     |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Layanan Infrastruktur E-Government | Pemancar Telepon Genggam                                         | 100 Unit   |
| 2  |                                    | Pemancar Telepon Stasioner                                       | 1 Unit     |
| 3  |                                    | Jaringan Fiber Optic (Tahap Proses Pemasangan)*                  | 4 Km       |
| 4  |                                    | CCTV                                                             | 6 Titik    |
| 5  |                                    | Server                                                           | 3 Unit     |
| 6  | Pengembangan Data dan Aplikasi     | Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten                | 88 Website |
| 7  |                                    | Tenaga IT yang Tersertifikasi                                    | 6 Orang    |
| 8  |                                    | ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Dinas Kominfo              | 2 Orang    |
| 9  | Statistik                          | ASN Pengelola Statistik Sektorial tersertifikasi Dinas Kominfo   | -          |
| 10 | Persandian                         | ASN Pengelola Pengamanan Persandian tersertifikasi Dinas Kominfo | 2 Orang    |
| 11 | Pengelolaan Informasi Publik       | Layanan Publik Online dan Terintegrasi                           | 1 Layanan  |
| 12 |                                    | Pejabat Penghubung Layanan LAPOR SP4N Kabupaten                  | 60 Orang   |
| 13 |                                    | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten                    | 10 KIM     |

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat

merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Tapin.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Tapin. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Tapin.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Tapin yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan Informatika Kab. Tapin dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:

1. Tapin Satu Data;
2. Nilai SPBE Kabupaten Tapin terendah kedua se Kalsel (SK Menpan-RB Nomor : 1503 Tahun 2021);
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengaplikasian konsep smart city;
5. Keterbukaan Informasi Publik;
6. Integrasi data statistik sektoral daerah;
7. Pengamanan Informasi dan Persandian.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 adalah ;

1. Pengembangan e-Government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi.

2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan diseminasi program pembangunan Pemerintah Daerah dan layanan publik yang diberikan.
4. Monitoring menara telekomunikasi
5. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan TIK.
6. Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan publisitas.
7. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

Penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan gambaran yang riil dan akurat terkait semua potensi maupun kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang ingin dicapai.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon khusus menjadi akselerator dalam peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Tabel 2-5  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Lembar : .....

| No  | Rancangan Awal RKPD                                              |        |                                                                                            |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |        |                                                                                            |                |                | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                          | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                          | Target Capaian | Kebutuhan Dana |                 |
| (1) | (2)                                                              | (3)    | (4)                                                                                        | (5)            | (6)                     | (7)                                                              | (8)    | (9)                                                                                        | (10)           | (11)           | (12)            |
| I   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA     | TAPIN  | Nilai Komponen AKIP                                                                        | 76 Poin        | 7.435.689.097           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | TAPIN  | Nilai Komponen AKIP                                                                        | 76 Poin        | 7.688.368.831  |                 |
|     |                                                                  |        | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                   | 100 %          |                         |                                                                  |        | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                   | 100 %          |                |                 |
|     |                                                                  |        | Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%                                                 | 100 %          |                         |                                                                  |        | Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%                                                 | 100 %          |                |                 |
|     |                                                                  |        | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat                                                      | 100 %          |                         |                                                                  |        | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat                                                      | 100 %          |                |                 |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TAPIN  | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 %          | 18.600.000              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TAPIN  | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 %          | 18.600.000     |                 |
|     |                                                                  |        | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti                                      | 90 %           |                         |                                                                  |        | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti                                      | 90 %           |                |                 |

|   |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                        |            |               |                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                        |            |               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
|   |                                                                                       |                 | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti                                                                              | 95 %       |               |                                                                                       |                 | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti                                                                              | 95 %       |               |  |
| A | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen | 12.600.000    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen | 12.600.000    |  |
| B | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 6.000.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 6.000.000     |  |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | TAPIN           | Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan                                                                                 | 100 %      | 3.463.538.819 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | TAPIN           | Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan                                                                                          | 100 %      | 3.463.542.682 |  |
|   |                                                                                       |                 | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan                                                                     | 100 %      |               |                                                                                       |                 | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan                                                                     | 100 %      |               |  |

|   |                                                                               |                 |                                                                                                                                                  |                 |               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                  |                 |               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| A | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Kabupaten Tapin | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 288 Orang/Bulan | 3.457.538.819 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Kabupaten Tapin | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 288 Orang/Bulan | 3.457.542.682 |  |
| B | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan       | 3.000.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan       | 3.000.000     |  |
| C | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan       | 3.000.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan       | 3.000.000     |  |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | TAPIN           | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas                                                                   | 41 %            | 2.027.775.900 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | TAPIN           | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas                                                                   | 41 %            | 2.315.208.927 |  |

|   |                                                                  |                 |                                                                     |            |               |                                                                  |                 |                                                                     |            |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| A | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 12 Paket   | 52.635.800    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 12 Paket   | 52.635.800    |  |
| B | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 12 Paket   | 290.704.000   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 12 Paket   | 538.998.027   |  |
| C | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | 12 Paket   | 50.010.100    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kabupaten Tapin | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | 12 Paket   | 50.010.100    |  |
| D | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 12 Laporan | 20.000.000    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 12 Laporan | 20.000.000    |  |
| E | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.614.426.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.653.565.000 |  |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | TAPIN           | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                   | 100 %      | 918.328.744   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | TAPIN           | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                   | 100 %      | 960.871.288   |  |
| A | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kabupaten Tapin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 70 Unit    | 918.328.744   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kabupaten Tapin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 70 Unit    | 960.871.288   |  |

|   |                                                                                                                    |                 |                                                                                                        |            |             |                                                                                                                    |                 |                                                                                                        |            |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | TAPIN           | Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                    | 100 %      | 616.229.164 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | TAPIN           | Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                    | 100 %      | 538.929.464 |  |
| A | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 371.051.724 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 293.713.144 |  |
| B | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 245.177.440 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 245.216.320 |  |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | TAPIN           | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      | 100 %      | 391.216.470 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | TAPIN           | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      | 100 %      | 391.216.470 |  |
| A | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Tapin | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit     | 80.160.700  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Tapin | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit     | 80.160.700  |  |

|    |                                                              |                 |                                                                          |        |               |                                                              |                 |                                                                          |        |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|
| B  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 2 Unit | 25.131.030    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 2 Unit | 25.131.030    |  |
| C  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Tapin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 285.924.740   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Tapin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 285.924.740   |  |
| II | PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | TAPIN           | Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial           | 70 %   | 2.288.451.540 | PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | TAPIN           | Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial           | 70 %   | 2.325.359.496 |  |
|    |                                                              |                 | Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina               | 75 %   |               |                                                              |                 | Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina               | 75 %   |               |  |
|    |                                                              |                 | Persentase peningkatan jasa publikasi daerah                             | 80 %   |               |                                                              |                 | Persentase peningkatan jasa publikasi daerah                             | 80 %   |               |  |
|    |                                                              |                 | Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan           | 90 %   |               |                                                              |                 | Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan           | 90 %   |               |  |

|   |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                               |      |               |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                               |      |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|
|   |                                                                              |       | Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional          | 86 % |               |                                                                              |       | Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional          | 86 % |               |  |
|   |                                                                              |       | Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 % |               |                                                                              |       | Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 % |               |  |
|   |                                                                              |       | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 % |               |                                                                              |       | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 % |               |  |
|   |                                                                              |       | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 % |               |                                                                              |       | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 % |               |  |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 % | 2.288.451.540 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 % | 2.325.359.496 |  |
|   |                                                                              |       | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 % |               |                                                                              |       | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 % |               |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |                                                                                                                                                                          |       |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|  |  |  | Persentase MoU yang diterbitkan                                                                                                                                          | 100 % |  |  |  | Persentase MoU yang diterbitkan                                                                                                                                          | 100 % |  |  |
|  |  |  | Persentase PPID pelaksana aktif                                                                                                                                          | 91 %  |  |  |  | Persentase PPID pelaksana aktif                                                                                                                                          | 91 %  |  |  |
|  |  |  | Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                     | 76 %  |  |  |  | Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                     | 76 %  |  |  |
|  |  |  | Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online       | 75 %  |  |  |  | Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online       | 75 %  |  |  |
|  |  |  | Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online | 90 %  |  |  |  | Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online | 90 %  |  |  |

|     |                                                                    |                 |                                                                                                                         |            |               |                                                                    |                 |                                                                                                                         |            |               |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| A   | Layanan Hubungan Media                                             | Kabupaten Tapin | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                           | 4 Layanan  | 1.453.519.200 | Layanan Hubungan Media                                             | Kabupaten Tapin | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                           | 4 Layanan  | 1.468.519.200 |  |
| B   | Pelayanan Informasi Publik                                         | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                         | 7 Dokumen  | 148.879.980   | Pelayanan Informasi Publik                                         | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                         | 7 Dokumen  | 170.881.104   |  |
| C   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 3 Dokumen  | 24.684.000    | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 3 Dokumen  | 24.684.000    |  |
| D   | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                               | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                               | 11 Dokumen | 214.801.600   | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                               | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                               | 11 Dokumen | 214.801.600   |  |
| E   | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                    | 9 Dokumen  | 434.342.860   | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                    | 9 Dokumen  | 434.249.692   |  |
| F   | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                  | Kabupaten Tapin | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan                                                                  | 114 Orang  | 12.223.900    | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                  | Kabupaten Tapin | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan                                                                  | 114 Orang  | 12.223.900    |  |
| III | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                       | TAPIN           | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo                          | 35 %       | 9.187.780.823 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                       | TAPIN           | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh                                     | 35 %       | 9.208.645.023 |  |

|   |                                                                                                                                |                 |                                                                                 |        |               |                                                                                                                                |                 |                                                                                 |        |               |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|
|   |                                                                                                                                |                 | Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 87 %   |               |                                                                                                                                |                 | Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 87 %   |               |  |
|   |                                                                                                                                |                 | Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)                       | 64 %   |               |                                                                                                                                |                 | Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)                       | 64 %   |               |  |
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN           | Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi                | 60 %   | 3.228.973.817 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN           | Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi                | 60 %   | 3.228.973.817 |  |
|   |                                                                                                                                |                 | Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi                                     | 87 %   |               |                                                                                                                                |                 | Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi                                     | 87 %   |               |  |
|   |                                                                                                                                |                 | Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website                     | 56 %   |               |                                                                                                                                |                 | Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website                     | 56 %   |               |  |
|   |                                                                                                                                |                 | Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website                        | 100 %  |               |                                                                                                                                |                 | Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website                        | 100 %  |               |  |
| A | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Kabupaten Tapin | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                  | 4 Unit | 1.896.686.391 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Kabupaten Tapin | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                  | 4 Unit | 1.896.686.391 |  |

|   |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                    |           |               |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                    |           |               |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| B | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupat en Tapin | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 5 Dokumen | 1.332.287.426 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupa ten Tapin | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 5 Dokumen | 1.332.287.426 |  |
| 2 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                               | TAPIN            | Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps                                              | 74 %      | 5.979.671.006 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                               | TAPIN            | Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps                                              | 74 %      | 5.979.671.206 |  |
|   |                                                                                                                    |                  | Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat                                                            | 56 %      |               |                                                                                                                    |                  | Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat                                                            | 56 %      |               |  |
|   |                                                                                                                    |                  | Persentase server sesuai standar                                                                                   | 48 %      |               |                                                                                                                    |                  | Persentase server sesuai standar                                                                                   | 48 %      |               |  |
|   |                                                                                                                    |                  | Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi                                                      | 74 %      |               |                                                                                                                    |                  | Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi                                                      | 74 %      |               |  |
|   |                                                                                                                    |                  | Persentase wifi publik yang sudah terbangun                                                                        | 56 %      |               |                                                                                                                    |                  | Persentase wifi publik yang sudah terbangun                                                                        | 56 %      |               |  |
|   |                                                                                                                    |                  | Persentase server yang mampu mengelola database                                                                    | 60 %      |               |                                                                                                                    |                  | Persentase server yang mampu mengelola database                                                                    | 60 %      |               |  |

|   |                                                                                                      |                  |                                                                                                                             |            |               |                                                                                                      |                  |                                                                                                                             |            |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| A | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupat en Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen  | 475.354.400   | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupa ten Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen  | 475.354.400   |  |
| B | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | Kabupat en Tapin | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                        | 4 Unit     | 478.210.466   | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | Kabupa ten Tapin | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                        | 4 Unit     | 528.210.466   |  |
| C | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | Kabupat en Tapin | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah    | 11 Dokumen | 2.518.850.300 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | Kabupa ten Tapin | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah    | 11 Dokumen | 2.518.850.300 |  |
| D | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         | Kabupat en Tapin | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasika n Sesuai dengan Masterplan Smart City                                  | 13 Dokumen | 2.099.136.900 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         | Kabupa ten Tapin | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasika n Sesuai dengan Masterplan Smart                                       | 13 Dokumen | 2.012.136.900 |  |

|    |                                                                     |                 |                                                                        |            |             |                                                                     |                 |                                                                        |            |             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| E  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE      | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 10 Dokumen | 387.254.940 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE      | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 10 Dokumen | 445.119.140 |  |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                          | TAPIN           | Indeks pembangunan Statistik (IPS)                                     | 2,6 Poin   | 677.948.020 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                          | TAPIN           | Indeks pembangunan Statistik (IPS)                                     | 2,6 Poin   | 617.564.020 |  |
|    |                                                                     |                 | Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi                   | 90 %       |             |                                                                     |                 | Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi                   | 90 %       |             |  |
|    |                                                                     |                 | Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu         | 90 %       |             |                                                                     |                 | Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu         | 90 %       |             |  |
| 1  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN           | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral            | 90 %       | 677.984.020 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | TAPIN           | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral            | 90 %       | 617.564.020 |  |
|    |                                                                     |                 | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral            | 90 %       |             |                                                                     |                 | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral            | 90 %       |             |  |
|    |                                                                     |                 | Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik    | 60 %       |             |                                                                     |                 | Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik    | 60 %       |             |  |

|   |                                                                                                      |                 |                                                                                                                         |            |             |                                                                                                      |                 |                                                                                                                         |            |             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
|   |                                                                                                      |                 | Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral                                                               | 1 Aplikasi |             |                                                                                                      |                 | Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral                                                               | 1 Aplikasi |             |  |
|   |                                                                                                      |                 | Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral                                                                         | 1 Dokumen  |             |                                                                                                      |                 | Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral                                                                         | 1 Dokumen  |             |  |
|   |                                                                                                      |                 | Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data                                                                      | 90 %       |             |                                                                                                      |                 | Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data                                                                      | 90 %       |             |  |
|   |                                                                                                      |                 | Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi                       | 50 %       |             |                                                                                                      |                 | Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi                       | 50 %       |             |  |
|   |                                                                                                      |                 | Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah | 67 %       |             |                                                                                                      |                 | Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah | 67 %       |             |  |
| A | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 11 Dokumen | 469.748.310 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kabupaten Tapin | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 11 Dokumen | 409.328.310 |  |

|   |                                                                                          |                 |                                                                                                  |          |             |                                                                                          |                 |                                                                                          |          |             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| B | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang | Kabupaten Tapin | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 1 Orang  | 40.000.000  | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang | Kabupaten Tapin | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang      | 1 Orang  | 40.000.000  |  |
| C | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS                      | 75 Orang | 168.235.710 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                     | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS              | 75 Orang | 168.235.710 |  |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                            | TAPIN           | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                                 | 30 %     | 466.036.002 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                            | TAPIN           | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                         | 30 %     | 466.004.112 |  |
|   |                                                                                          |                 | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website         | 100 %    |             |                                                                                          |                 | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website | 100 %    |             |  |
|   |                                                                                          |                 | Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi           | 50 %     |             |                                                                                          |                 | Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi   | 50 %     |             |  |
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah                         | TAPIN           | Persentase sandiman yang tersertifikasi                                                          | 50 %     | 459.390.402 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah                         | TAPIN           | Persentase sandiman yang tersertifikasi                                                  | 50 %     | 459.358.512 |  |

|                          |  |                                                                                               |      |  |                          |  |                                                                                               |      |  |  |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Daerah<br>Kabupaten/Kota |  | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi              | 60 % |  | Daerah<br>Kabupaten/Kota |  | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi              | 60 % |  |  |
|                          |  | Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan          | 50 % |  |                          |  | Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan          | 50 % |  |  |
|                          |  | Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan | 50 % |  |                          |  | Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan | 50 % |  |  |
|                          |  | Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade                                | 56 % |  |                          |  | Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade                                | 56 % |  |  |
|                          |  | Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi                                              | 50 % |  |                          |  | Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi                                              | 50 % |  |  |
|                          |  | Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik                          | 50 % |  |                          |  | Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik                          | 50 % |  |  |

|   |                                                                                                          |                 |                                                                                                                         |                     |             |                                                                                                          |                 |                                                                                                                         |                     |             |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--|
|   |                                                                                                          |                 | Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan               | 100 %               |             |                                                                                                          |                 | Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan               | 100 %               |             |  |
|   |                                                                                                          |                 | Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik                                                                 | 100 %               |             |                                                                                                          |                 | Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik                                                                 | 100 %               |             |  |
| A | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan          | 237.400.402 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kabupaten Tapin | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan          | 236.150.912 |  |
| B | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                               | 54 Perangkat Daerah | 221.990.000 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                               | 54 Perangkat Daerah | 223.207.600 |  |
| 2 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar                                                           | TAPIN           | Persentase titik PHKS yang teramankan                                                                                   | 33 %                | 6.645.600   | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar                                                           | TAPIN           | Persentase titik PHKS yang teramankan                                                                                   | 33 %                | 6.645.600   |  |

|        |                                                                           |                 |                                                                      |                    |           |                                                                           |                 |                                                                      |                    |           |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
|        | Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                 | Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun               | 100 %              |           | Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                 | Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun               | 100 %              |           |  |
| A      | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 6.645.600 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Tapin | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 6.645.600 |  |
| JUMLAH |                                                                           |                 | 20.055.941.482                                                       |                    |           | JUMLAH                                                                    |                 |                                                                      | 20.305.941.482     |           |  |

Tahun 2023 Dinas Kominfo sudah membangun Jaringan Fiber Optik dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, dan Bappelitbang. Dan selanjutnya pada tahun 2024 Dinas Kominfo akan melanjutkan pembangunan Jaringan Fiber Optik untuk melayani perkantoran di wilayah sekitar kawasan Rantau Baru. Kemudian seiring perencanaan kedepan Dinas Kominfo harus didukung dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan data center/pusat data dan ini membutuhkan sarana penunjang yang memadai, tersedia nya ruang khusus Command Center serta perlengkapan penunjangnya antara lain kamera, layar monitor besar/videotron indoor, laptop, mixer audio, microfon dan lain-lain. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk mendukung pembangunan Command Center ini. Dukungan Layanan Digital dengan Pembangunan/pengembangan aplikasi. Disamping itu, saat ini sudah terpasang 6 CCTV dari rencana target sebanyak 30 titik sampai dengan tahun 2026 yaitu, Simpang Jl. Datu Suban, Area RB Tapin, Simpang Jl. Datu Nuraya, Bundaran Rantau, Jl. A. Yani, Alun Alun Basimban Dwi Dharma. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diiharapkan dengan adanya jaringan dan CCTV ini dapat meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam perencanaan program dan kegiatan TA. 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin mencoba semaksimal mungkin memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tapin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat. Usulan ataupun permintaan dari Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melalui mekanisme Forum RKPD, Musrenbang, maupun melalui surat usulan secara langsung melalui dinas.

Bebagai permasalahan yang terjadi berkaitan keterbukaan informasi publik adalah manajemen keamanan informasi, infrastruktur TIK serta ketimpangan wilayah yang belum semuanya terjangkau sarana informasi-informasi yang memadai.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah perlu dilakukannya sistem manajemen keamanan informasi, pembangunan infrastruktur TIK serta koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan telah dituangkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008, yaitu Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaga agar informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi UU tersebut dilakukan dengan:

- a. Mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan-badan Publik pemerintahan dan non pemerintah sekaligus memberdayakannya;
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi publik di Badan-badan publik dengan sosialisasi, advokasi dan edukasi, memanfaatkan forum- forum tidak formal yang berkembang di tengah masyarakat.
- c. Pembuatan Perda tentang keterbukaan informasi publik di Kab. Tapin. Saluran informasi dari non pemerintah yang diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Perda Kab. Tapin Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa di wilayah perbatasan melalui beberapa program dan kegiatan. Diantaranya dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) yang ada, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Melalui KIM yang berfungsi sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat.

Keberadaan LKS bermanfaat untuk memfilter informasi yang beredar di masyarakat, sehingga keberadaan dan keberlangsungannya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Demikian juga keberadaan kelompok-kelompok masyarakat pemerhati media sosial perlu juga untuk dibina dan diberdayakan dalam rangka menangkal penyebaran berita negatif menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diharapkan dapat hadir di semua kalangan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan informasi pada setiap tingkatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga. Perlu diadakan literasi dan sosialisasi bagi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang diperlukan. Perlunya integrasi aplikasi instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Tapin sehingga informasi yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan.

Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Tapin, telah dilaksanakan pemasangan Jaringan Fiber Optik untuk melayani komunikasi berbasis internet maupun intranet di Pemerintah Kabupaten Tapin. Namun beberapa instansi masih belum terjangkau jaringan Fiber Optik. Dalam perkembangannya infrastruktur jaringan juga harus terlayani dengan baik. Sementara untuk memberikan pelayanan publik tingkat Desa/Kelurahan berbasis teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mendesain pembangunan infrastruktur TI di Desa/Kelurahan. Desain itu juga untuk mengintegrasikan informasi pemanfaatan APBD dan Dana Desa serta Sistem Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

**3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sedangkan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah
- 3. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**3.3 Program dan Kegiatan**

Awal usulan program kegiatan 2024 meliputi 5 program urusan kominfo (11 kegiatan) dan 1 Program kegiatan pendukung, 4 Program kegiatan sasaran dengan memperhatikan pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin tahun 2024.

Guna mendapat hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, secara terinci disusun program, indikator, dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2024 dan memiliki target kinerja yang akan dicapai sesuai Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (tidak termasuk program Administrasi Umum) dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dalam program mencakup beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan program, dan setiap indikator didukung oleh beberapa kegiatan.

**Uraian Program dan Kegiatan TA. 2024 Urusan**

**Komunikasi Dan Informatika**

- 1. Program Aplikasi Informatika
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah.
  - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah Kabupaten /Kota;
  - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas;
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
- 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
    - Pengelolaan Media Komunikasi;
    - Pelayanan Informasi Publik;
    - Layanan Hubungan Media;
    - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas.
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor.
    - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
    - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**3.4. Review terhadap Perubahan RKPD 2024**

Pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2024 telah disusun berdasarkan RPD dan Renstra 2024-2026. Untuk urusan kominfo tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap program maupun kegiatan pada TA 2024.

Mengacu pada dokumen Perubahan RKPD TA 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan beberapa penyesuaian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Program Kegiatan yang Mengalami Perubahan

| NO  | PROGRAM KEGIATAN                                                                      | ANGGARAN PERUBAHAN (Rp) |               | BERTAMBAH/<br>BERKURANG<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
|     |                                                                                       | SEBELUM                 | SESUDAH       |                                 |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | 7,435,689,097           | 7,688,368,831 | 252,679,734                     |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 18,600,000              | 18,600,000    | 0                               |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 12,600,000              | 12,600,000    | 0                               |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6,000,000               | 6,000,000     | 0                               |
| 2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 3,463,538,819           | 3,463,542,682 | 3,863                           |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3,457,538,819           | 3,457,542,682 | 3.863                           |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3,000,000               | 3,000,000     | 0                               |
| 2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 3,000,000               | 3,000,000     | 0                               |
| 3   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 2,027,775,900           | 2,315,208,927 | 287,433,027                     |
| 3.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 52,635,800              | 52,635,800    | 0                               |
| 3.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 290,704,000             | 538,998,027   | 248,294,027                     |
| 3.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 50,010,100              | 50,010,100    | 0                               |
| 3.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 20,000,000              | 20,000,000    | 0                               |
| 3.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 1,614,426,000           | 1,653,565,000 | 39,139,000                      |
| 4   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 918,328,744             | 960,871,288   | 42,542,544                      |
| 4.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 918,328,744             | 960,871,288   | 42,542,544                      |
| 5   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 616,229,164             | 538,929,464   | (77,299,700)                    |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 371,051,724             | 293,713,144   | (77,338,580)                    |
| 5.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 245,177,440             | 245,216,320   | 38,880                          |

|     |                                                                                                                                |               |               |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 6   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 391,216,470   | 391,216,470   | 0          |
| 6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | 80,160,700    | 80,160,700    | 0          |
| 6.1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                       | 25,131,030    | 25,131,030    | 0          |
| 6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | 285,924,740   | 285,924,740   | 0          |
| B   | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                                                                            | 2,288,451,540 | 2,325,359,496 | 36,907,956 |
| 1   | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 2,288,451,540 | 2,325,359,496 | 36,907,956 |
| 1.1 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                           | 214,801,600   | 214,801,600   | 0          |
| 1.2 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            | 434,342,860   | 434,249,692   | (93,168)   |
| 1.3 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                     | 148,879,980   | 170,881,104   | 22,001,124 |
| 1.4 | Layanan Hubungan Media                                                                                                         | 1,453,519,200 | 1,468,519,200 | 15,000,000 |
| 1.5 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                              | 12,223,900    | 12,223,900    | 0          |
| 1.6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi                                                            | 24,684,000    | 24,684,000    | 0          |
| C   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                                                       | 9,187,780,823 | 9,208,645,023 | 20,864,200 |
| 1   | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3,228,973,817 | 3,228,973,817 | 0          |
| 1.1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | 1,332,287,426 | 1,332,287,426 | 0          |
| 1.2 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | 1,896,686,391 | 1,896,686,391 | 0          |
| 2   | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 5,958,807,006 | 5,979,671,206 | 20,864,200 |
| 2.1 | Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 475,354,400   | 475,354,400   | 0          |

|     |                                                                                                          |               |               |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.2 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                 | 478,210,466   | 528,210,466   | 50,000,000   |
| 2.3 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                             | 2,099,136,900 | 2,012,136,900 | 87,000,000   |
| 2.4 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi Infomasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah             | 2,518,850,300 | 2,518,850,300 | 0            |
| 2.5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                           | 387,254,940   | 445,119,140   | 57.864.200   |
| D   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                               | 677,984,020   | 617,564,020   | (60,420,000) |
| 1   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                      | 677,984,020   | 617,564,020   | (60,420,000) |
| 1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral     | 469,748,310   | 409,328,310   | (60,420,000) |
| 1.2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi    | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| 1.3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                     | 168,235,710   | 168,235,710   | 0            |
| E   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                            | 466,036,002   | 466,004,112   | (31,890)     |
| 1   | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | 459,390,402   | 459,358,512   | (31,890)     |
| 1.1 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 237,400,402   | 236,150,912   | (1,249,490)  |
| 1.2 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | 221,990,000   | 223,207,600   | 1,217,600    |
| 2   | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                           | 6,645,600     | 6,645,600     | 0            |
| 2.1 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                | 6,645,600     | 6,645,600     | 0            |

Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mengalami perubahan anggaran dari Rp. 20.055.941.482 menjadi Rp. 20.305.941.482 sehingga terdapat perubahan sebesar Rp. 250.000.000. Anggaran tersebut untuk membiayai 5 program, 11 kegiatan, dan 35

subkegiatan.

Dimana pada tahun 2024 ini lebih difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas SDM baik pengelola TIK, sumberdaya Informasi dan Komunikasi publik terkait teknis pembuatan film dan berita melalui Video Production for Government Campaign dari Government Tranformation Accademy (GTA) yang bekerjasama dengan BPSDM Kementerian Kominfo, SDM Statistik dan Persandian, Kemudian dukungan fasilitas perlengkapan kantor, memperluas jaringan fiber optic dan CCTV wilayah kabupaten, dan juga Pembangunan/Pengembagan Sistem Informasi (Aplikasi)

Untuk melihat Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.2 Rincian Perubahan Anggaran Program Kegiatan TA 2024  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tapin

| No  | Program/<br>Kegiatan                                                        | SEBELUM PERUBAHAN                                                                          |                               |               | SETELAH PERUBAHAN                                                                          |                               |               | Bertambah atau<br>Berkurang | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
|     |                                                                             | Indikator Kinerja                                                                          | Target Kinerja<br>Kuantitatif | Anggaran      | Indikator Kinerja                                                                          | Target Kinerja<br>Kuantitatif | Anggaran      |                             |      |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                                                        | (4)                           | (5)           | (6)                                                                                        | (7)                           | (8)           | (9)                         | (10) |
| A   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA | Nilai Komponen AKIP                                                                        | 76 Poin                       | 7.435.689.097 | Nilai Komponen AKIP                                                                        | 76 Poin                       | 7.688.368.831 | 252.678.734                 |      |
|     |                                                                             | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                   | 100 %                         |               | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                   | 100 %                         |               |                             |      |
|     |                                                                             | Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%                                                 | 100 %                         |               | Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%                                                 | 100 %                         |               |                             |      |
|     |                                                                             | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat                                                      | 100 %                         |               | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat                                                      | 100 %                         |               |                             |      |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 %                         | 18.600.000    | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 %                         | 18.600.000    | 0                           |      |
|     |                                                                             | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti                                      | 90 %                          |               | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti                                      | 90 %                          |               |                             |      |
|     |                                                                             | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti  | 95 %                          |               | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti  | 95 %                          |               |                             |      |

|   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |               |                                                                                                                                                                        |                  |               |       |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|--|
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen       | 12.600.000    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen       | 12.600.000    | 0     |  |
| b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan       | 6.000.000     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan       | 6.000.000     | 0     |  |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan                                                                                | 100 %            | 3.463.538.819 | Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan                                                                                | 100 %            | 3.463.542.682 | 3.863 |  |
|   |                                                                                       | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)                                                               | 100 %            |               | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)                                                               | 100 %            |               |       |  |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 288 Orang/ Bulan | 3.457.538.819 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 288 Orang/ Bulan | 3.457.542.682 | 3.863 |  |
| b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        | 3.000.000     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        | 3.000.000     | 0     |  |

|   |                                                                               |                                                                                                                                                  |            |               |                                                                                                                                                  |            |               |             |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| c | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan  | 3.000.000     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan  | 3.000.000     | 0           |  |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas                                                                   | 41 %       | 2.027.775.900 | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas                                                                   | 41 %       | 2.315.208.927 | 287.433.027 |  |
| a | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                   | 12 Paket   | 52.635.800    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                   | 12 Paket   | 52.635.800    | 0           |  |
| b | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                               | 12 Paket   | 290.704.000   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                               | 12 Paket   | 538.998.027   | 248.294.027 |  |
| c | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 12 Paket   | 50.010.100    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 12 Paket   | 50.010.100    | 0           |  |
| d | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                         | 12 Laporan | 20.000.000    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                         | 12 Laporan | 20.000.000    | 0           |  |
| e | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | 12 Laporan | 1.614.426.000 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | 12 Laporan | 1.653.565.000 | 39.139.000  |  |

|   |                                                                       |                                                                                                 |            |             |                                                                                                 |            |             |            |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--|
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                               | 100 %      | 918.328.744 | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                               | 100 %      | 960.871.288 | 42.542.544 |  |
| a | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 70 Unit    | 918.328.744 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 70 Unit    | 960.871.288 | 42.542.544 |  |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik | 100 %      | 616.229.164 | Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik | 100 %      | 538.929.464 | 77.299.700 |  |
| a | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 12 Laporan | 371.051.724 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 12 Laporan | 293.713.144 | 77.338.580 |  |
| b | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 12 Laporan | 245.177.440 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 12 Laporan | 245.216.320 | 38.880     |  |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                               | 100 %      | 391.216.470 | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                               | 100 %      | 391.216.470 | 0          |  |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                        |        |               |                                                                                                        |        |               |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|--|
| a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 80.160.700    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 80.160.700    | 0          |  |
| b | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 Unit | 25.131.030    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 Unit | 25.131.030    | 0          |  |
| c | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | 3 Unit | 285.924.740   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | 3 Unit | 285.924.740   | 0          |  |
| A | PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                             | Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial                                         | 70 %   | 2.288.451.540 | Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial                                         | 70 %   | 2.325.359.496 | 36.907.956 |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina                                             | 75 %   |               | Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina                                             | 75 %   |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase peningkatan jasa publikasi daerah                                                           | 80 %   |               | Persentase peningkatan jasa publikasi daerah                                                           | 80 %   |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan                                         | 90 %   |               | Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan                                         | 90 %   |               |            |  |

|   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |       |               |                                                                                                                                                                                                               |       |               |            |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--|
|   |                                                                              | Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional          | 86 %  |               | Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional          | 86 %  |               |            |  |
|   |                                                                              | Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 %  |               | Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 %  |               |            |  |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 %  | 2.288.451.540 | Persentase jumlah konten yang ditayangkan                                                                                                                                                                     | 75 %  | 2.325.359.496 | 36.907.956 |  |
|   |                                                                              | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 %  |               | Persentase jumlah jam tayang                                                                                                                                                                                  | 87 %  |               |            |  |
|   |                                                                              | Persentase MoU yang diterbitkan                                                                                                                                                                               | 100 % |               | Persentase MoU yang diterbitkan                                                                                                                                                                               | 100 % |               |            |  |
|   |                                                                              | Persentase PPID pelaksana aktif                                                                                                                                                                               | 91 %  |               | Persentase PPID pelaksana aktif                                                                                                                                                                               | 91 %  |               |            |  |
|   |                                                                              | Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                          | 76 %  |               | Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                          | 76 %  |               |            |  |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |            |               |                                                                                                                                                                                              |            |               |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--|
|   |                                                                    | Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)       | 75 %       |               | Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)       | 75 %       |               |            |  |
|   |                                                                    | Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 %       |               | Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) | 90 %       |               |            |  |
| a | Layanan Hubungan Media                                             | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                                                                                | 4 Layanan  | 1.453.519.200 | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                                                                                | 4 Layanan  | 1.468.519.200 | 15.000.000 |  |
| b | Pelayanan Informasi Publik                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                              | 7 Dokumen  | 148.879.980   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                              | 7 Dokumen  | 170.881.104   | 22.001.124 |  |
| c | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan                                                                      | 3 Dokumen  | 24.684.000    | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan                                                                      | 3 Dokumen  | 24.684.000    | 0          |  |
| d | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                               | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                                                                    | 11 Dokumen | 214.801.600   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                                                                    | 11 Dokumen | 214.801.600   | 0          |  |

|   |                                                                                                                                |                                                                                                |           |               |                                                                                                |           |               |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--|
| e | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                           | 9 Dokumen | 434.342.860   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                           | 9 Dokumen | 434.249.692   | (93.168)   |  |
| f | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                              | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan                                         | 114 Orang | 12.223.900    | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan                                         | 114 Orang | 12.223.900    | 0          |  |
| C | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                   | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo | 35 %      | 9.187.780.823 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo | 35 %      | 9.208.645.023 | 20.864.200 |  |
|   |                                                                                                                                | Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                | 87 %      |               | Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                | 87 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                                | Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)                                      | 64 %      |               | Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)                                      | 64 %      |               |            |  |
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi                               | 60 %      | 3.228.973.817 | Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi                               | 60 %      | 3.228.973.817 | 0          |  |
|   |                                                                                                                                | Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi                                                    | 87 %      |               | Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi                                                    | 87 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                                | Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website                                    | 56 %      |               | Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website                                    | 56 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                                | Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website                                       | 100 %     |               | Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website                                       | 100 %     |               |            |  |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |               |                                                                                                                                   |           |               |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--|
| a | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                            | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                    | 4 Unit    | 1.896.686.391 | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                    | 4 Unit    | 1.896.686.391 | 0          |  |
| b | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 1.332.287.426 | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 1.332.287.426 | 0          |  |
| 2 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                               | Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps                                                             | 74 %      | 5.979.671.006 | Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps                                                             | 74 %      | 5.979.671.206 | 20.864.200 |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat                                                                           | 56 %      |               | Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat                                                                           | 56 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase server sesuai standar                                                                                                  | 48 %      |               | Persentase server sesuai standar                                                                                                  | 48 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi                                                                     | 74 %      |               | Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi                                                                     | 74 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase wifi publik yang sudah terbangun                                                                                       | 56 %      |               | Persentase wifi publik yang sudah terbangun                                                                                       | 56 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                    | Persentase server yang mampu mengelola database                                                                                   | 60 %      |               | Persentase server yang mampu mengelola database                                                                                   | 60 %      |               |            |  |
|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |               |                                                                                                                                   |           |               |            |  |

|   |                                                                                                      |                                                                                                                             |            |               |                                                                                                                            |            |               |              |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|
| a | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen  | 475.354.400   | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen  | 475.354.400   | 0            |  |
| b | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                        | 4 Unit     | 478.210.466   | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                       | 4 Unit     | 528.210.466   | 50.000.000   |  |
| c | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah    | 11 Dokumen | 2.518.850.300 | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah   | 11 Dokumen | 2.518.850.300 | 0            |  |
| d | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                   | 13 Dokumen | 2.099.136.900 | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                  | 13 Dokumen | 2.012.136.900 | (87.000.000) |  |
| e | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE                                                      | 10 Dokumen | 387.254.940   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE                                                     | 10 Dokumen | 445.119.140   | 57.864.200   |  |

|   |                                                                     |                                                                     |            |             |                                                                     |            |             |              |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--|
| D | PROGRAM<br>PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL                         | Indeks pembangunan Statistik (IPS)                                  | 2,6 Poin   | 677.948.020 | Indeks pembangunan Statistik (IPS)                                  | 2,6 Poin   | 617.564.020 | (60.420.000) |  |
|   |                                                                     | Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi                | 90 %       |             | Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi                | 90 %       |             |              |  |
|   |                                                                     | Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu      | 90 %       |             | Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu      | 90 %       |             |              |  |
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral         | 90 %       | 677.984.020 | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral         | 90 %       | 617.564.020 | (60.420.000) |  |
|   |                                                                     | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral         | 90 %       |             | Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral         | 90 %       |             |              |  |
|   |                                                                     | Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik | 60 %       |             | Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik | 60 %       |             |              |  |
|   |                                                                     | Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral           | 1 Aplikasi |             | Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral           | 1 Aplikasi |             |              |  |
|   |                                                                     | Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral                     | 1 Dokumen  |             | Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral                     | 1 Dokumen  |             |              |  |
|   |                                                                     | Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data                  | 90 %       |             | Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data                  | 90 %       |             |              |  |

|   |                                                                                                       |                                                                                                                         |             |                    |                                                                                                                         |             |                    |                 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--|
|   |                                                                                                       | Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi                       | 50 %        |                    | Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi                       | 50 %        |                    |                 |  |
|   |                                                                                                       | Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah | 67 %        |                    | Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah | 67 %        |                    |                 |  |
| A | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 11 Dokumen  | 469.748.310        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 11 Dokumen  | 409.328.310        | (60.420.000)    |  |
| B | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                     | 1 Orang     | 40.000.000         | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                     | 1 Orang     | 40.000.000         | 0               |  |
| C | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS                                             | 75 Orang    | 168.235.710        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS                                             | 75 Orang    | 168.235.710        | 0               |  |
| 5 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN</b>                                                             | <b>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</b>                                                                                 | <b>30 %</b> | <b>466.036.002</b> | <b>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</b>                                                                                 | <b>30 %</b> | <b>466.004.112</b> | <b>(31.890)</b> |  |

|   |                                                                                      |                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |             |          |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|--|
|   | UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI                                                     | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengaman informasi pada website SANAPATI | 100 % |             | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengaman informasi pada website SANAPATI | 100 % |             |          |  |
|   |                                                                                      | Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi          | 50 %  |             | Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi          | 50 %  |             |          |  |
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sandiman yang tersertifikasi                                                         | 50 %  | 459.390.402 | Persentase sandiman yang tersertifikasi                                                         | 50 %  | 459.358.512 | (31.890) |  |
|   |                                                                                      | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi                | 60 %  |             | Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi                | 60 %  |             |          |  |
|   |                                                                                      | Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan            | 50 %  |             | Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan            | 50 %  |             |          |  |
|   |                                                                                      | Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan   | 50 %  |             | Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan   | 50 %  |             |          |  |
|   |                                                                                      | Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade                                  | 56 %  |             | Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade                                  | 56 %  |             |          |  |

|   |                                                                                                          |                                                                                                                         |                     |             |                                                                                                                         |                     |             |             |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|   |                                                                                                          | Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi                                                                        | 50 %                |             | Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi                                                                        | 50 %                |             |             |  |
|   |                                                                                                          | Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik                                                    | 50 %                |             | Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik                                                    | 50 %                |             |             |  |
|   |                                                                                                          | Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan               | 100 %               |             | Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan               | 100 %               |             |             |  |
|   |                                                                                                          | Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik                                                                 | 100 %               |             | Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik                                                                 | 100 %               |             |             |  |
| a | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan          | 237.400.402 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan          | 236.150.912 | (1.249.490) |  |
| b | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                               | 54 Perangkat Daerah | 221.990.000 | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                               | 54 Perangkat Daerah | 223.207.600 | 1.217.600   |  |

|       |                                                                                |                                                                      |                    |                |                                                                      |                    |                |             |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| 2     | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase titik PHKS yang teramankan                                | 33 %               | 6.645.600      | Persentase titik PHKS yang teramankan                                | 33 %               | 6.645.600      | 0           |  |
|       |                                                                                | Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun               | 100 %              |                | Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun               | 100 %              |                |             |  |
| a     | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 6.645.600      | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 Perangkat Daerah | 6.645.600      | 0           |  |
| TOTAL |                                                                                |                                                                      |                    | 20.055.941.482 | TOTAL                                                                |                    | 20.305.941.482 | 250.000.000 |  |

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

## BAB V

### PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2024, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Perubahan Renja sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Perubahan Rencana kerja ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan daerah Tahun 2024-2026, yaitu: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

  
PJ. BUPATI TAPIN,  
  
M. SYARIFUDDIN, M.PD